
Kritik QS. Al-Ma'un Terhadap Religiositas Simbolik: Perspektif Tafsir Bil Ra'yi atas Fenomena Penyalahgunaan Otoritas Keagamaan

Baiq Intan Amalia¹, Helga Juliya², Akhmad Dasuki³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia

Email Correspondence: baiqintan308@gmail.com

Kata Kunci :

Qs Al-Ma'un; Religiositas Simbolik; Tafsir Bil Ra'yi; Otoritas Keagamaan; Islam Indonesia

Abstrak

Fenomena religiositas simbolik keberagamaan yang mengutamakan penampilan ritual tanpa internalisasi nilai sosial merupakan distorsi sistemik yang mengancam integritas keberagamaan dan membuka ruang bagi penyalahgunaan otoritas keagamaan, khususnya dalam konteks Islam Indonesia kontemporer. Penelitian ini bertujuan menganalisis kritik QS. Al-Ma'un terhadap religiositas simbolik melalui perspektif tafsir bil ra'yi serta memetakan relevansinya terhadap fenomena penyalahgunaan otoritas keagamaan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah kualitatif berbasis library research dengan pendekatan tafsir mawdhu'i, kritik ideologi Mannheim, dan analisis wacana kritis Fairclough, bersumber pada kitab-kitab tafsir mu'tabar dan literatur sosiologi agama bereputasi internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Al-Ma'un mengonstruksi kritik pada dua level: individual, yakni inkonsistensi antara ritual dengan perilaku sosial; dan struktural, yakni penggunaan agama sebagai instrumen legitimasi ketidakadilan yang berkorespondensi secara langsung dengan pola instrumentalisasi politik, komersialisasi otoritas, dan monopoli kebenaran yang terdokumentasi dalam konteks Indonesia. Penelitian ini berkontribusi dalam menawarkan model kajian tafsir interdisipliner yang mempertemukan hermeneutika Al-Qur'an dengan ilmu sosial kritis sebagai instrumen normatif reformasi etika keberagamaan.

Keywords :

Qs. Al-Ma'un; Symbolic Religiosity; Tafsir Bil Ra'yi; Religious Authority; Indonesian Islam

Abstract

The phenomenon of symbolic religiosity a form of religious practice that prioritizes ritual performance over the internalization of social value represents a systematic distortion that threatens religious integrity and creates space for the abuse of religious authority, particularly within the contemporary Indonesian Muslim context. This study aims to analyze the critique embedded in QS. Al-Ma'un against symbolic religiosity

through the perspective of tafsir bil ra'yi and to map its relevance to the phenomenon of religious authority abuse in Indonesia. A qualitative library research method was employed, integrating thematic exegesis (tafsir mawdhu'i), Mannheim's ideology critique, and Fairclough's critical discourse analysis, drawing on authoritative tafsir works and internationally reputable sociology of religion literature. The findings reveal that Al-Ma'un constructs its critique at two levels: individually, exposing the inconsistency between ritual practice and social behavior; and structurally, challenging social-religious systems that instrumentalize religion to legitimize injustice patterns that directly correspond to the documented phenomena of political instrumentalization, commercialization of authority, and monopolization of religious truth in Indonesia. This study contributes an interdisciplinary tafsir model that bridges Qur'anic hermeneutics and critical social science as a normative instrument for reforming religious ethics.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY-SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

PENDAHULUAN

Agama dalam konteks kehidupan manusia tidak pernah berdiri sebagai entitas yang steril dari dinamika sosial, politik, dan kultural yang melingkupinya. Sejak peradaban pertama manusia terbentuk, agama telah memainkan peran ganda yang paradoksal: di satu sisi ia menjadi sumber nilai transendental yang menopang tatanan moral kolektif, sementara di sisi lain ia kerap menjadi instrumen yang rentan terhadap distorsi dan penyalahgunaan oleh mereka yang memiliki kepentingan tertentu. Paradoks ini bukan sekadar fenomena marginal, melainkan merupakan bagian inheren dari dinamika keberagamaan manusia yang telah didokumentasikan secara luas dalam berbagai tradisi keilmuan, mulai dari sosiologi agama, antropologi, hingga studi Islam kontemporer. Dalam konteks ini, memahami agama tidak cukup hanya dengan membaca teksnya secara literal, melainkan membutuhkan pendekatan hermeneutik yang mampu menerobos lapisan-lapisan ideologis yang seringkali menyembunyikan realitas di balik simbol-simbol keagamaan yang tampak saleh. Upaya pembacaan kritis semacam inilah yang menjadikan kajian tafsir Al-Qur'an bukan sekadar aktivitas filologis, tetapi juga sebuah tindakan intelektual yang berimplikasi langsung pada transformasi sosial. (*Hamid_Jordan_MB-Libre.Pdf, n.d.*)

Salah satu fenomena keberagamaan yang paling mengundang perhatian dalam kajian studi Islam adalah apa yang oleh para sosiolog agama disebut sebagai *religiositas simbolik* suatu bentuk praktik keagamaan yang mengutamakan penampilan ritual dan simbol-simbol lahiriah tanpa diikuti oleh internalisasi nilai-nilai substansial yang menjadi ruh dari praktik tersebut. Konsep ini pertama kali dioperasionalkan secara sistematis oleh Glock dan Stark dalam kerangka multidimensi religiusitas, yang membedakan antara dimensi ritualistik, ideologis, intelektual, eksperiensial, dan

konsekuensial dari keberagamaan seseorang. Ketika dimensi ritualistik menguat secara tidak proporsional sementara dimensi konsekuensial yakni dampak nyata keberagamaan terhadap perilaku sosial mengalami atrofi, maka lahirlah apa yang dapat diidentifikasi sebagai religiositas yang kehilangan substansinya. Fenomena ini dalam konteks masyarakat Muslim kontemporer termanifestasi dalam berbagai bentuk: dari penyelenggaraan ritual keagamaan yang megah namun tidak berdampak pada sensitivitas sosial, hingga penggunaan simbol-simbol kesalehan sebagai modal simbolik dalam arena kompetisi politik dan ekonomi. Giddens dalam kerangka teori strukturasi-nya bahkan mengidentifikasi bahwa simbol-simbol keagamaan dalam masyarakat modern seringkali mengalami proses *disembedding* terlepas dari konteks sosial asalnya dan difungsikan ulang dalam logika kapitalisme dan politik identitas (Charles Y. Glock und Rodney Stark, 1965).

Al-Qur'an sebagai teks foundational Islam tidak tinggal diam terhadap realitas distorsi keberagamaan semacam itu. QS. Al-Ma'un (107), meskipun tergolong surah pendek yang terdiri dari tujuh ayat, menyimpan muatan kritik yang secara sosiologis dan teologis sangat fundamental terhadap fenomena religiositas simbolik. Surah ini diturunkan dalam konteks sosio-historis Makkah pra-hijrah, di mana struktur masyarakat didominasi oleh oligarki Quraisy yang memadukan kekuatan ekonomi dengan otoritas keagamaan untuk mempertahankan tatanan sosial yang eksploitatif. Melalui serangkaian pertanyaan retorik dan pernyataan deskriptif yang tajam, surah ini membangun sebuah argumen bahwa pengingkaran terhadap hari pembalasan (*yukadzdzibu bid-din*) tidak selalu berwujud penolakan teologis yang eksplisit, melainkan justru lebih sering termanifestasi dalam perilaku sosial yang mengabaikan kaum lemah — menelantarkan anak yatim dan tidak mendorong pemberian makan kepada orang miskin. Lebih lanjut, ayat keempat hingga ketujuh surah ini secara eksplisit mengaitkan celan tersebut dengan mereka yang melaksanakan salat, menunjukkan bahwa kritik Al-Ma'un bukan ditujukan kepada kaum kafir yang tidak beragama, melainkan kepada mereka yang aktif dalam ritual keagamaan namun abai terhadap dimensi sosialnya. Relevansi hermeneutis surah ini dalam konteks kontemporer menjadikannya sumber normatif yang kaya untuk menganalisis fenomena penyalahgunaan otoritas keagamaan. (Rahman, 2009).

Untuk mengoperasionalkan pembacaan kritis terhadap QS. Al-Ma'un dalam konteks fenomena kontemporer, artikel ini mengadopsi pendekatan *tafsir bil ra'yi* sebagai kerangka metodologis utamanya. Tafsir bil ra'yi, yang secara epistemologis berbasis pada penalaran rasional dan ijtihad kontekstual, telah lama menjadi subjek perdebatan dalam tradisi ilmu tafsir — antara mereka yang memandangnya sebagai bentuk penafsiran yang legitimate selama berpijak pada kaidah-kaidah kebahasaan dan maqashid syariah, dengan mereka yang memandangnya rentan terhadap subjektivisme dan penyimpangan. Al-Dhahabi dalam monumentalnya *Al-Tafsir wa al-Mufassirun* membedakan antara tafsir bil ra'yi al-mahmud (yang terpuji) dan tafsir bil ra'yi al-madzmun (yang tercela), di mana perbedaannya terletak pada apakah penalaran rasional tersebut digunakan untuk mengungkap makna yang konsisten

dengan maqashid syariah ataukah untuk memaksakan pembacaan yang melayani kepentingan ideologis tertentu. Pilihan metodologis ini secara deliberatif diambil dalam artikel ini karena fenomena penyalahgunaan otoritas keagamaan adalah fenomena yang hidup dalam konteks kekinian, sehingga penafsiran yang mampu menjembatani teks dengan realitas sosial kontemporer menjadi sebuah keniscayaan metodologis. Dengan kerangka tafsir bil ra'yi yang bertanggung jawab, surah Al-Ma'un dapat dibaca tidak hanya sebagai dokumen historis, tetapi sebagai teks normatif yang terus memproduksi makna dalam setiap konteks peradaban Al-Dhahabi, M. H. (1976).

Fenomena penyalahgunaan otoritas keagamaan yang menjadi objek material kajian ini bukanlah fenomena yang terisolasi pada satu tradisi keagamaan atau periode sejarah tertentu, melainkan merupakan pola yang berulang dalam berbagai peradaban dan konteks sosio-politik. Dalam konteks Islam Indonesia khususnya, riset-riset sosiologis menunjukkan bahwa otoritas keagamaan — yang dalam struktur masyarakat Muslim Indonesia dilekatkan pada figur ulama, kyai, atau ustaz — rentan mengalami transformasi dari fungsi normatifnya sebagai penjaga nilai menuju fungsi instrumental sebagai agen kekuasaan. Weber dalam tipologi otoritasnya mengidentifikasi otoritas karismatik sebagai kategori yang paling relevan untuk menggambarkan fenomena ini: otoritas yang dibangun bukan atas dasar aturan legal-rasional, melainkan atas dasar persepsi publik terhadap kesucian atau kehebatan supernatural seseorang, sehingga sangat rentan terhadap manipulasi dan personalisasi kepentingan. Ketika otoritas karismatik keagamaan dipadukan dengan akses terhadap sumber daya ekonomi dan jaringan politik, terbentuklah apa yang dapat disebut sebagai *religious power complex* — sebuah konsentrasi kekuasaan yang menggunakan bahasa agama untuk mereproduksi dirinya sendiri sambil secara sistematis mengabaikan amanah sosial yang menjadi legitimasi awalnya. Kritik Al-Ma'un terhadap mereka yang salat namun *saun* (berbuat sewenang-wenang) menjadi sangat tepat untuk membingkai analisis terhadap fenomena ini Weber, M. (1978).

Bertolak dari keseluruhan problematika yang telah diuraikan, artikel ini menetapkan empat tujuan analitis yang saling berkelindan: *pertama*, mengonstruksi pembacaan tafsir bil ra'yi terhadap QS. Al-Ma'un yang secara metodologis ketat namun tetap responsif terhadap konteks sosial kontemporer; *kedua*, mengidentifikasi dan menganalisis karakteristik-karakteristik religiositas simbolik sebagai distorsi sistemik dalam praktik keberagamaan dengan merujuk pada kerangka sosiologi agama yang relevan; *ketiga*, memetakan pola-pola penyalahgunaan otoritas keagamaan dalam konteks Islam kontemporer dan menelusuri relasinya dengan kriteria normatif yang dibangun oleh Al-Ma'un; dan *keempat*, merumuskan implikasi teologis dan sosial dari kajian ini bagi wacana reformasi etika keberagamaan. Secara metodologis, kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode library research yang mengintegrasikan analisis tafsir tematik (*tafsir mawdhu'i*), kritik ideologi (*ideology critique*) à la Mannheim, dan pendekatan sosiologi pengetahuan. Kontribusi orisinal artikel ini terletak pada upayanya untuk membangun dialog antara tradisi

tafsir klasik dengan perangkat analitis ilmu sosial kritis dalam membaca fenomena keberagaman kontemporer — sebuah pendekatan yang dalam literatur studi Islam internasional semakin diakui sebagai keniscayaan epistemologis untuk menjawab kompleksitas realitas Muslim masa kini Mannheim, K. (2013).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis *library research* dengan metode analisis tafsir tematik (*tafsir mawdhu'i*), kritik ideologi dalam tradisi sosiologi pengetahuan Mannheim, dan analisis wacana kritis (*Critical Discourse Analysis*) dalam kerangka Fairclough. Pendekatan kualitatif dipilih atas dasar pertimbangan epistemologis bahwa fenomena religiositas simbolik dan penyalahgunaan otoritas keagamaan merupakan realitas yang bersifat interpretatif dan kontekstual, sehingga membutuhkan kerangka analisis yang mampu menangkap kompleksitas makna di balik teks dan praktik sosial keagamaan, bukan sekadar mengukur frekuensi atau korelasinya secara statistic (Bowen, 2009).

Subjek kajian dalam penelitian ini mencakup tiga entitas utama yang saling berkaitan: *pertama*, teks QS. Al-Ma'un (107: 1–7) sebagai objek tafsir primer; *kedua*, korpus literatur tafsir mu'tabar yang dijadikan rujukan analisis, meliputi *Tafsir al-Thabari* karya Ibn Jarir al-Thabari, *Tafsir al-Kasysyaf* karya al-Zamakhshyari, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an* karya Sayyid Quthb, dan *Tafsir al-Misbah* karya M. Quraish Shihab; *ketiga*, fenomena penyalahgunaan otoritas keagamaan dalam konteks Islam kontemporer sebagai objek kontekstual yang dianalisis melalui lensa normatif Al-Ma'un. Keseluruhan subjek kajian ini ditelaah secara integratif sehingga menghasilkan dialog yang produktif antara teks normatif Al-Qur'an dengan realitas sosial yang menjadi konteks aplikasinya (Lincoln & Guba, 1985).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa cara penafsiran bil ra'yi untuk QS. Al-Ma'un menekankan bahwa Al-Qur'an tidak hanya mengulas ibadah pribadi, tetapi juga memberikan kontribusi pada perubahan sosial yang fokus pada kepedulian terhadap kelompok minoritas, moralitas komunitas, dan persatuan umat manusia. Penafsiran berdasarkan konteks terhadap QS. Al-Ma'un yang mengisyaratkan bahwa kritik dari Al-Qur'an diarahkan pada amalan keagamaan yang hanya berupa lambang dan seremonial tanpa disertai perbuatan sosial yang benar-benar ada. Dalam situasi masyarakat sekarang, cara ini sangat krusial untuk memberikan jawaban atas permasalahan sosial seperti ketidakadilan, penampilan keagamaan di media sosial, dan minimnya kepedulian terhadap golongan yang terabaikan (Amir & Hamzah, 2019).

Tafsir Tematik QS. Al-Ma'un: Anatomi Kritik Qur'ani

QS. Al-Ma'un merupakan salah satu surah dalam Al-Qur'an yang paling padat muatan kritisnya terhadap fenomena distorsi keberagamaan, dan pemahaman yang mendalam terhadap surah ini membutuhkan pembacaan yang tidak hanya berhenti pada permukaan linguistik teksnya, tetapi juga menyelami lapisan-lapisan makna yang tersimpan dalam struktur retorikanya, konteks sosio-historis penurunannya, serta relasinya dengan keseluruhan visi normatif Al-Qur'an tentang keberagamaan yang otentik. Secara struktural, surah ini membangun argumennya melalui dua segmen tematik yang saling menopang secara dialektis: segmen pertama yang mencakup ayat satu hingga tiga mengidentifikasi pendustaan terhadap agama (*yukadzdzibu bid-din*) bukan dengan penolakan teologis eksplisit terhadap doktrin, melainkan dengan perilaku sosial yang eksploitatif dan dehumanisatif terhadap kaum lemah, sementara segmen kedua yang mencakup ayat empat hingga tujuh mengekspos paradoks keberagamaan ritualistik yang secara formal tampak saleh namun secara substansial kosong dari nilai-nilai yang seharusnya menjadi rohnya. Dialektika antara dua segmen ini bukan kebetulan retorik, melainkan sebuah konstruksi argumentatif yang terencana untuk membangun tesis teologis yang fundamental: bahwa iman dan amal sosial adalah dua sisi dari satu keping mata uang yang tidak dapat dipisahkan tanpa menghancurkan nilainya. Al-Thabari dalam tafsirnya menegaskan bahwa frasa "*ara'aital ladzi yukadzdzibu bid-din*" adalah sebuah *istifham inkari* pertanyaan retorik yang sekaligus mengandung penolakan dan kecaman keras yang secara pragmatis berfungsi untuk mengguncang kesadaran pembaca dan memaksanya keluar dari zona nyaman asumsi-asumsi keberagamaannya yang telah terbentuk secara konvensional (Solihin, 2024).

Kajian QS. Al-Ma'un menampilkan Al-Qur'an yang menggabungkan aspek rohani dengan kewajiban bermasyarakat. Teguran bagi orang yang "mendustakan agama" ditujukan pada orang yang menganggap ibadah sekadar lambang formal tanpa memberi manfaat nyata di masyarakat. Dari cara pandang tafsir bil ra'yi, ayat Al-Ma'un bisa dianggap sebagai penolakan terhadap kebiasaan beragama yang hanya fokus pada pengesahan jati diri keagamaan, sementara keadilan sosial telah terlupakan. Hal ini menunjukkan bahwa tolok ukur penting keagamaan menurut Al-Qur'an bukan hanya pada ketatnya ritual, melainkan sejauh mana ritual tersebut memupuk kepedulian, kekompakan sosial, dan bantuan untuk kaum yang terasing (Jannah, 2015).

Menurut kajian Aswar dan Rizky Shorfana, QS. Al-Ma'un dapat dipahami sebagai teks emansipatoris. Teks ini mengkritik simbolisme keberagamaan digital. Simbolisme itu kehilangan aspek solidaritas sosial. Fenomena religiositas simbolik juga dipengaruhi oleh budaya digital. Budaya ini mendorong orang membentuk identitas diri melalui visual. Agama kini bukan sekadar pedoman spiritual. Agama juga menjadi elemen pembentuk identitas masyarakat. Makanya, kesalehan sering dinilai dari penampilan luar. Ini bukan dari sumbangsih sosial atau moralitas seseorang. Dalam tampilan ini, QS. Al-Ma'un sangat penting. Ayat Ini Menekankan

ukuran keberagaman tidak hanya ritual. Perhatian pada golongan yang terpinggirkan juga penting (Aswar et al., 2025).

Analisis linguistik yang lebih mendalam terhadap pilihan-pilihan leksikal dalam QS. Al-Ma'un mengungkap lapisan-lapisan makna yang tidak tampak pada pembacaan permukaan. Zamakhsyari dalam *Al-Kasysyaf* yang dikenal sebagai salah satu kitab tafsir paling tajam dalam analisis linguistik dan balaghah mengidentifikasi bahwa penggunaan kata "*yukadzdzibu*" dalam bentuk *fi'il mudhari'* mengandung signifikansi gramatikal yang sangat penting: bentuk ini menunjukkan bahwa pendustaan agama yang dimaksud bukanlah sebuah peristiwa tunggal yang terjadi di masa lampau, melainkan sebuah pola perilaku yang sedang berlangsung, berulang, dan sistematis dalam diri subjek yang dikritik. Pemilihan bentuk kata kerja ini secara hermeneutis menggeser pemahaman tentang "pendusta agama" dari kategori teologis-doktrinal menuju kategori perilaku-sosial yang dinamis dan kontekstual siapa pun yang secara konsisten menunjukkan pola perilaku mengabaikan kaum lemah dan mempertahankan privilege sosialnya atas nama agama, pada hakikatnya sedang mendustakan agama itu sendiri terlepas dari pengakuan teologisnya. Lebih jauh, Zamakhsyari juga menganalisis bahwa kata "*yadu'ul yatim*" menghardik anak yatim menggunakan kata kerja yang mengandung makna kekerasan aktif dan intensional, bukan sekadar kelalaian pasif, sehingga kritik Al-Ma'un bukan hanya ditujukan kepada mereka yang lupa membantu kaum lemah, melainkan kepada mereka yang secara aktif menggunakan posisi kekuasaan mereka untuk menyingkirkan dan mengeksklusi kaum yang tidak berdaya (Samsi Tsauri et al., 2021).

Sayyid Quthb dalam *Fi Zhilalil Qur'an* memberikan pembacaan yang paling sosiologis dan paling tajam secara politis terhadap QS. Al-Ma'un di antara seluruh mufasir yang dikaji dalam penelitian ini. Quthb mengidentifikasi bahwa surah ini pada hakikatnya sedang membangun sebuah redefinisi radikal terhadap konsep agama itu sendiri bahwa "*din*" dalam Al-Qur'an bukan sekadar sistem kepercayaan teologis atau seperangkat ritual yang dilaksanakan secara periodik, melainkan sebuah *manhaj hayah* atau sistem kehidupan yang komprehensif yang secara inheren mencakup dimensi keadilan sosial, redistribusi kekayaan, dan perlindungan terhadap kaum yang rentan. Dalam kerangka pembacaan Quthb ini, mendustakan "*din*" berarti menolak sistem nilai komprehensif tersebut dalam perilaku nyata, dan praktik menelantarkan anak yatim serta tidak mendorong pemberian makan kepada orang miskin adalah manifestasi konkret dari penolakan tersebut. Quthb juga dengan sangat tajam mengidentifikasi bahwa konteks sosio-historis penurunan surah ini yakni struktur oligarki Makkah yang memadukan kekuatan ekonomi dengan otoritas keagamaan menjadikan kritik Al-Ma'un bukan sekadar teguran moral individual, melainkan sebuah gugatan struktural terhadap sistem sosial yang menggunakan agama sebagai instrumen untuk mempertahankan ketidakadilan. Relevansi pembacaan ini terhadap konteks Indonesia kontemporer di mana agama seringkali difungsikan untuk melegitimasi ketimpangan ekonomi dan konsentrasi kekuasaan menjadi sangat gamblang dan tidak dapat diabaikan (Aji & Yusron, 2022).

Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Mishbah* memberikan kontribusi hermeneutis yang sangat penting dengan fokus analisisnya pada ayat keempat dan kelima yang memuat frasa "*fawaylun lil mushalliin alladzinahum 'an shalatihim saahun*". Shihab menegaskan bahwa "*waylun*" dalam tradisi linguistik Arab klasik bukan sekadar ekspresi celaan biasa, melainkan mengandung makna kehancuran dan kesengsaraan yang paling dalam sebuah kata yang dalam Al-Qur'an selalu digunakan untuk menggambarkan kondisi yang paling parah dari kebinasaan moral dan spiritual. Penempatan kata ini sebelum "*lil mushalliin*" orang-orang yang salat menciptakan sebuah *oxymoron* teologis yang sangat disengaja: bagaimana mungkin orang yang melaksanakan ibadah paling fundamental dalam Islam justru mendapat ancaman kehancuran? Jawaban atas paradoks ini terletak pada analisis Shihab terhadap frasa "'*an shalatihim saahun*" yang ia terjemahkan bukan sebagai "lalai dalam salatnya" tetapi "lalai dari salatnya" sebuah perbedaan preposisi yang secara hermeneutis sangat signifikan. Kelalaian *dalam* salat merujuk pada gangguan konsentrasi saat ibadah berlangsung, sementara kelalaian *dari* salat merujuk pada keterputusan antara nilai-nilai yang seharusnya diinternalisasi dalam salat dengan perilaku sosial yang ditampilkan setelahnya. Dengan kata lain, kritik Al-Ma'un ditujukan kepada mereka yang melaksanakan salat secara teknis-formal namun tidak membawa nilai-nilai salat kesadaran transendental, kerendahan hati, dan kepedulian sosial ke dalam kehidupan sehari-hari mereka (*Tafsir Al-Mishbah Jilid 10*, n.d.).

Religiositas Simbolik sebagai Distorsi Sistemik Keberagamaan

Konsep religiositas simbolik yang menjadi variabel analitis sentral dalam penelitian ini membutuhkan landasan teoretis yang kokoh agar dapat difungsikan sebagai alat analisis yang presisi dan tidak sekadar menjadi label pejoratif yang digunakan secara sembarangan. Glock dan Stark dalam karya klasik mereka *Religion and Society in Tension* (1965) membangun kerangka multidimensi religiusitas yang membedakan lima dimensi yang berbeda namun saling berkaitan: dimensi keyakinan (*belief*), dimensi praktik ritual (*practice*), dimensi pengalaman (*experience*), dimensi pengetahuan (*knowledge*), dan dimensi konsekuensial (*consequences*). Di antara kelima dimensi ini, dimensi konsekuensial yakni sejauh mana keberagamaan seseorang berdampak nyata pada perilaku sosialnya dalam kehidupan sehari-hari adalah dimensi yang paling sering terabaikan dalam evaluasi religiusitas, baik oleh komunitas keagamaan itu sendiri maupun oleh para peneliti yang terlalu terfokus pada dimensi ritual dan keyakinan. Religiositas simbolik sebagaimana yang dikritik dalam QS. Al-Ma'un adalah kondisi di mana dimensi praktik ritual menguat secara tidak proporsional sementara dimensi konsekuensial mengalami atrofi sistemik sebuah disequilibrium yang menghasilkan bentuk keberagamaan yang secara sosiologis disfungsi karena gagal menjalankan fungsi dasarnya sebagai penggerak transformasi moral dan sosial (*Charles Y. Glock Und Rodney Stark: Religion and Society in Tension (1965) | Springer Nature Link*, n.d.).

Dalam konteks Indonesia, fenomena ini tampak dari semakin banyaknya ekspresi keagamaan di ranah publik yang belum tentu selaras dengan peningkatan integritas sosial. Banyak individu atau kelompok yang besar dalam ritual keagamaan namun tetap terlibat dalam perilaku korupsi, ketidaktoleranan, dan berpikiran sosial. Kondisi ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara aspek seremoni dan aspek hasil dari praktik keagamaan sebagaimana diuraikan oleh Glock dan Strak. Dengan demikian, QS. Al-Ma'un dapat dipandang sebagai sebuah sanggahan terhadap praktik keagamaan yang berhenti pada lambang dan gagal menghasilkan etika sosial yang autentik (Sungadi, 2020).

Bourdieu melalui konsep *champ religieux* atau medan keagamaan memberikan kerangka analitis yang lebih struktural dan lebih kritis untuk memahami mengapa religiositas simbolik tidak sekadar merupakan kegagalan moral individual, melainkan merupakan produk logis dari dinamika kekuasaan dalam struktur sosial keagamaan. Dalam kerangka Bourdieu, medan keagamaan adalah arena di mana berbagai aktor ulama, institusi keagamaan, negara, dan awam bersaing untuk mendapatkan akumulasi dan legitimasi *modal simbolik* keagamaan, yakni sumber daya-sumber daya yang memberikan otoritas dan pengakuan dalam konteks keagamaan. Simbol-simbol kesalehan penguasaan teks suci, pakaian keagamaan, gelar-gelar keulamaan, frekuensi dan kekhusyukan ibadah yang ditampilkan secara publik berfungsi sebagai bentuk-bentuk modal simbolik yang dapat diakumulasikan dan dikonversi menjadi modal sosial dan ekonomi dalam medan yang lebih luas. Dalam logika medan ini, muncullah insentif struktural bagi penampilan kesalehan yang tidak selalu harus disertai oleh internalisasi nilai-nilai yang ditampilkan tersebut, karena yang dievaluasi dan dihargai oleh medan adalah penampilan (*performance*) bukan substansi (*substance*). Bourdieu menyebut dinamika ini sebagai *doxa* sistem keyakinan yang tersembunyi dan tidak disadari yang mengatur logika permainan dalam suatu medan dan dalam konteks keagamaan, *doxa* ini menciptakan kondisi di mana religiositas simbolik tidak hanya dimaklumi tetapi secara struktural diproduksi dan direproduksi (*Language and Symbolic Power - Pierre Bourdieu - Google Books, n.d.*).

Dalam konteks Indonesia kontemporer, religiositas simbolik sebagai fenomena sosial memiliki manifestasi yang sangat konkret dan terdokumentasi secara akademik dengan baik. Hasil penelitian Syamsul Arifin (2015) yang dipublikasikan dalam *Jurnal Islamica* menunjukkan bahwa pertumbuhan pesat ekspresi keagamaan formal di Indonesia pasca-Reformasi yang ditandai oleh proliferasi majelis taklim, meningkatnya konsumsi media keagamaan, dan menguatnya identitas Islam dalam ruang publik tidak secara otomatis diikuti oleh penguatan komitmen terhadap nilai-nilai keadilan sosial yang menjadi substansi ajaran Islam. Paradoks ini mencapai manifestasinya yang paling tajam dalam data Transparency International (2023) yang menunjukkan bahwa Indonesia dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan tingkat praktik ibadah yang sangat tinggi masih mendapatkan skor 34 dari 100 dalam Indeks Persepsi Korupsi, menempatkan Indonesia pada peringkat 115 dari 180 negara yang disurvei. Data ini secara sosiologis sangat signifikan karena korupsi yang pada

hakikatnya adalah pengkhianatan terhadap amanah publik dan eksploitasi terhadap kaum lemah adalah manifestasi paling konkret dari kegagalan dimensi konsekuensial keberagamaan, dan keberadaannya yang persisten di tengah masyarakat dengan tingkat religiusitas formal yang tinggi mengkonfirmasi secara empiris tesis tentang disequilibrium dimensi-dimensi religiusitas yang diidentifikasi oleh Glock dan Stark (Nurhakim et al., 2025).

Dimensi psikologis dari religiusitas simbolik juga perlu mendapatkan perhatian analitis yang memadai, karena tanpa pemahaman tentang mekanisme psikologis yang menopangnya, fenomena ini sulit untuk dijelaskan secara komprehensif. Festinger melalui teori *cognitive dissonance* menjelaskan bahwa manusia memiliki kecenderungan yang kuat untuk mempertahankan konsistensi antara keyakinan dan perilakunya, dan ketika terjadi inkonsistensi seperti antara keyakinan keagamaan dengan perilaku sosial yang bertentangan dengannya individu cenderung mengembangkan mekanisme-mekanisme psikologis untuk mereduksi disonansi tersebut. Dalam konteks religiusitas simbolik, salah satu mekanisme reduksi disonansi yang paling umum adalah *rationalization* pembenaran rasional atas perilaku yang tidak konsisten dengan nilai-nilai yang dianut dan *compartmentalization* pemisahan antara domain keagamaan dan domain sosial dalam kehidupan sehingga inkonsistensi di antara keduanya tidak perlu dirasakan sebagai kontradiksi. Mekanisme-mekanisme psikologis ini menjelaskan mengapa religiusitas simbolik dapat bertahan begitu lama tanpa menimbulkan krisis identitas yang berarti bagi pelakunya, dan mengapa kritik eksternal terhadap fenomena ini seringkali tidak menghasilkan perubahan perilaku yang signifikan karena system of defense psikologis yang melindunginya sangat kuat dan sudah terinstitusionalisasi (Miller et al., 2015).

Tafsir Bil Ra'yi sebagai Kerangka Hermeneutik Kontekstual

Legitimasi epistemologis tafsir bil ra'yi sebagai metode penafsiran Al-Qur'an merupakan persoalan yang tidak dapat diselesaikan secara sederhana tanpa memahami kerangka perdebatan yang telah berlangsung selama berabad-abad dalam tradisi keilmuan Islam. Al-Suyuthi dalam *Al-Itqan fi Ulum al-Qur'an* mendokumentasikan bahwa akar perdebatan ini dapat dilacak hingga ke masa sahabat, di mana terdapat dua orientasi metodologis yang berbeda dalam mendekati teks Al-Qur'an: orientasi pertama yang menekankan transmisi (*naql*) dan sangat berhati-hati terhadap penggunaan penalaran personal dalam penafsiran, dan orientasi kedua yang lebih terbuka terhadap penggunaan akal dan kontekstualisasi dalam memahami makna-makna Al-Qur'an. Al-Dhahabi dalam *Al-Tafsir wa al-Mufasssirun* merumuskan pembedaan yang lebih sistematis dengan memperkenalkan dikotomi antara tafsir bil ra'yi al-mahmud yang terpuji karena berpijak pada kaidah kebahasaan yang valid, tidak bertentangan dengan maqashid syariah, dan tidak melayani kepentingan ideologis tertentu dengan tafsir bil ra'yi al-madzmun yang tercela karena menggunakan penalaran untuk memaksakan pembacaan yang telah ditentukan

sebelumnya oleh kepentingan kelompok atau ideologi tertentu. Perbedaan ini secara metodologis sangat krusial karena ia menunjukkan bahwa persoalannya bukan pada penggunaan ra'yi itu sendiri, melainkan pada orientasi dan tujuan dari penggunaan tersebut (Elkarimah, 2022).

Fazlur Rahman dalam kerangka hermeneutikanya yang berpengaruh memperkenalkan metode *double movement* yang memberikan landasan metodologis yang lebih sistematis bagi penerapan tafsir bil ra'yi dalam konteks modern. Gerakan pertama dalam metode ini bergerak dari teks Al-Qur'an menuju konteks historis penurunannya memahami apa yang direspons oleh teks tersebut dalam realitas sosial-historis Makkah dan Madinah abad ketujuh, mengidentifikasi prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai universal yang menjadi substansi respons tersebut melampaui ketentuan-ketentuan spesifiknya yang terikat konteks. Gerakan kedua kemudian bergerak dari prinsip-prinsip universal yang telah diidentifikasi tersebut menuju konteks kontemporer menerapkan prinsip-prinsip tersebut untuk menghasilkan respons normatif yang relevan terhadap tantangan-tantangan keberagamaan yang dihadapi oleh umat Islam masa kini. Dalam penerapannya terhadap QS. Al-Ma'un, gerakan pertama menghasilkan identifikasi prinsip-prinsip universal seperti: keharusan keberpihakan agama terhadap kaum lemah, ketidakabsahan religiusitas yang tidak berdampak sosial, dan penolakan terhadap otoritas keagamaan yang mengkhianati amanah sosialnya. Gerakan kedua kemudian mengaplikasikan prinsip-prinsip ini untuk mengevaluasi fenomena penyalahgunaan otoritas keagamaan dalam konteks Indonesia kontemporer, menghasilkan kriteria normatif yang kokoh secara teologis namun relevan secara kontekstual (*Islam & Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition - Fazlur Rahman - Google Books*, n.d.).

Tafsir bil ra'yi memainkan peranan krusial dalam menghubungkan teks Al-Qur'an dengan perubahan sosial yang terjadi saat ini. Metode ini memberi kesempatan kepada penafsir untuk menemukan makna mendalam Al-Qur'an tanpa terjebak dalam pemahaman yang hanya bersifat historis. Secara keseluruhan dengan QS. Al-Ma'un, tafsir bil ra'yi memberikan kemungkinan penafsiran yang lebih variatif terhadap isu-isu ketidakadilan sosial masa kini seperti korupsi, perlindungan agama, dan pemanfaatan kekuasaan keagamaan (Muzayyin, 2015).

Pendekatan interpretasi bil ra'yi mengemukakan bahwa Al-Qur'an tidak hanya mencakup ibadah pribadi, tetapi juga mentransformasikan masyarakat. Oleh karena itu, penafsiran QS. Al-Ma'un seharusnya menitikberatkan pada upaya membangun kesadaran sosial, kepedulian antar sesama, serta etika di ruang publik. Penafsiran semacam ini krusial agar Al-Qur'an relevan dengan permasalahan yang dihadapi masyarakat kini. Dalam kajian tafsir kontemporer, metode pendekatan ini berfungsi untuk memahami bahwa pesan utama QS. Al-Ma'un adalah membentuk spiritualitas yang berpusat pada nilai-nilai kemanusiaan dan memelihara kelompok-kelompok yang termarginalkan (Nikmatika & Izzat, 2026).

Nashr Hamid Abu Zayd memperkaya kerangka tafsir bil ra'yi kontemporer dengan konsepnya tentang *al-ma'na wa al-maghza* perbedaan antara makna historis

teks yang terikat pada konteks asal penurunannya dengan signifikansi atau implikasi makna yang terus berkembang seiring dengan perubahan konteks pembacaan. Dalam kerangka Abu Zayd, teks Al-Qur'an adalah *muntaj tsaqafi* produk budaya yang lahir dalam dan melalui interaksi antara wahyu ilahi dengan realitas historis-sosial komunitas penerimanya namun sekaligus memiliki dimensi transendental yang membuatnya terus produktif dalam menghasilkan makna-makna baru yang relevan untuk konteks-konteks yang berbeda. Penerapan kerangka ini terhadap QS. Al-Ma'un menghasilkan sebuah pembedaan yang sangat produktif secara hermeneutis: *ma'na* atau makna historis surah ini adalah kritik terhadap oligarki Quraisy yang menggunakan otoritas keagamaan untuk mempertahankan dominasi ekonomi dan sosial mereka di Makkah pra-hijrah sementara *maghza* atau signifikansinya yang terus relevan adalah prinsip universal bahwa setiap bentuk otoritas keagamaan yang tidak disertai oleh keberpihakan nyata terhadap kaum lemah dan marjinal adalah otoritas yang telah kehilangan legitimasi moralnya. Pembedaan ini memungkinkan pembacaan Al-Ma'un yang sekaligus historis tidak mengabaikan konteks asalnya dan kontekstual tidak membeku dalam pembacaan yang terikat pada konteks yang telah berlalu (Sulaiman, 2023).

Penyalahgunaan Otoritas Keagamaan dalam Cermin Al-Ma'un

Analisis terhadap fenomena penyalahgunaan otoritas keagamaan dalam konteks Islam Indonesia kontemporer membutuhkan terlebih dahulu sebuah kerangka konseptual yang presisi tentang apa yang dimaksud dengan "otoritas keagamaan" dan mekanisme-mekanisme melalui mana otoritas tersebut dapat disalahgunakan. Weber dalam tipologi otoritasnya yang klasik mengidentifikasi tiga tipe ideal otoritas: otoritas tradisional yang berbasis pada kebiasaan dan tradisi yang telah lama mapan, otoritas legal-rasional yang berbasis pada aturan dan prosedur yang telah dilembagakan, dan otoritas karismatik yang berbasis pada persepsi publik terhadap kualitas-kualitas luar biasa yang dimiliki oleh seseorang. Otoritas keagamaan dalam konteks Islam Indonesia terutama beroperasi dalam mode karismatik – dibangun di atas persepsi komunitas terhadap kedalaman ilmu, kesalehan personal, dan kedekatan spiritual seorang figur dengan yang sacral namun dalam perkembangannya seringkali mengalami apa yang Weber sebut sebagai *routinization of charisma*, yakni proses institusionalisasi otoritas karismatik ke dalam struktur-struktur yang lebih permanen dan terorganisir yang memungkinkan akumulasi dan pewarisan otoritas tersebut. Proses institusionalisasi ini, sambil memberikan stabilitas pada otoritas keagamaan, juga menciptakan kondisi-kondisi struktural yang memungkinkan penyalahgunaan: ketika otoritas karismatik telah terlembaga dan tidak lagi bergantung pada kualitas personal yang hidup, ia dapat digunakan oleh siapa pun yang berhasil menguasai posisi institusionalnya terlepas dari apakah ia memiliki kualitas-kualitas yang awalnya melegitimasi otoritas tersebut (Swedberg, 2007).

Penyalahgunaan otoritas keagamaan merupakan salah satu bentuk paling nyata dari religiositas simbolik yang dikritik dalam QS. Al-Ma'un. Otoritas agama yang seharusnya digunakan untuk membimbing masyarakat menuju keadilan dan kemaslahatan sering kali berubah menjadi alat legitimasi kepentingan politik dan ekonomi. Dalam situasi ini, agama tidak lagi menjadi sarana pembebasan sosial, melainkan instrumen dominasi kelompok tertentu (Susanti & Rohwati, 2025).

Fenomena tersebut terlihat dalam meningkatnya politisasi agama di Indonesia, terutama melalui penggunaan narasi keagamaan untuk membangun loyalitas politik atau membungkam kritik sosial. Praktik semacam ini bertentangan dengan spirit Al-Ma'un yang menempatkan keberpihakan kepada kaum lemah sebagai indikator utama autentisitas iman. Karena itu, kritik Al-Ma'un terhadap *riya'*, pengabaian sosial, dan ritualisme kosong tetap relevan untuk mengevaluasi legitimasi moral para pemegang otoritas keagamaan di era modern (M Yunus Firdaus et al., 2023).

Di era media sosial ini, pengaruh keagamaan tidak lagi eksklusif menjadi milik para ahli, tetapi juga tokoh digital yang memiliki bobot besar di dunia maya. Keadaan ini telah mengubah sumber otoritas keagamaan dari dasar pengetahuan menjadi dasar popularitas. Hal ini dapat mendukung penyebaran pemahaman agama yang dangkal dan cenderung manipulatif. Rumadi menjelaskan bahwa otoritas keagamaan dalam Islam bersifat dinamis dan terus mengalami perubahan sesuai perkembangan sosial masyarakat (Rumadi, 2012). Sementara itu, penelitian Naila Nabihah Qonita menunjukkan bahwa percakapan keagamaan di media sosial sering kali lebih didominasi oleh figur populer dibanding otoritas keagamaan yang memiliki kapasitas keilmuan mendalam (Qonita Nabihah Naila et al., 2024).

Bruinessen dalam riset komprehensifnya tentang perkembangan Islam Indonesia kontemporer mengidentifikasi setidaknya tiga pola utama penyalahgunaan otoritas keagamaan yang memiliki implikasi sosial yang signifikan. Pola pertama adalah *instrumentalisasi politik otoritas keagamaan*, yakni penggunaan kapital simbolik keagamaan untuk kepentingan mobilisasi politik dan elektoral tanpa komitmen yang nyata terhadap nilai-nilai keadilan sosial yang diperjuangkan agama. Pola ini menemukan manifestasinya yang paling dramatis dalam fenomena *politisasi identitas Islam* yang menguat sejak Pemilu 2014 dan mencapai puncaknya pada Pilkada DKI Jakarta 2016-2017, di mana otoritas keagamaan difungsikan untuk memobilisasi massa atas dasar sentimen keagamaan yang seringkali berseberangan dengan semangat keadilan dan inklusivitas yang menjadi nilai inti ajaran Islam. Pola kedua adalah *komersialisasi otoritas keagamaan*, yakni monetisasi posisi sebagai tokoh agama melalui berbagai mekanisme yang melampaui batas-batas yang dapat dibenarkan secara etis dari endorsement produk komersial yang mengeksploitasi kepercayaan jamaah, hingga pembangunan imperium bisnis yang menggunakan jaringan keagamaan sebagai infrastruktur pemasaran. Pola ketiga dan yang paling merusak secara epistemologis adalah *monopoli kebenaran dan pembungkaman kritik*, di mana otoritas keagamaan digunakan untuk menyatakan diri sebagai pemegang satu-satunya tafsir yang benar dan secara sistematis mendiskreditkan suara-suara kritis melalui label-

label keagamaan yang menegasi seperti "sesat," "liberal," atau "anti-Islam." (Bruinessen, 2013).

Data empiris yang mendukung identifikasi pola-pola di atas tersedia secara melimpah dalam riset-riset akademik bereputasi tentang dinamika keagamaan Indonesia. Mietzner dan Muhtadi dalam studi mereka yang dipublikasikan dalam *Asian Studies Review* (2018) menunjukkan secara empiris bahwa polarisasi keagamaan di Indonesia yang menguat dalam satu dekade terakhir secara signifikan didriving oleh aktor-aktor yang memiliki otoritas keagamaan namun beroperasi dalam logika persaingan politik dan ekonomi, bukan dalam logika pelayanan terhadap umat. Temuan ini diperkuat oleh survei Wahid Foundation (2020) yang menemukan bahwa eksposur terhadap narasi-narasi keagamaan yang diproduksi oleh figur-figur otoritas yang menyalahgunakan posisi mereka berkorelasi positif dengan meningkatnya intoleransi dan kesiapan untuk melakukan tindakan kekerasan atas nama agama di kalangan responden. Penelitian Fealy dan White dalam *Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia* lebih jauh menunjukkan bahwa transformasi karakter sebagian institusi keagamaan Indonesia dari lembaga pendidikan dan moral menuju entitas yang lebih menyerupai organisasi kekuasaan terjadi seiring dengan masuknya logika pasar dan politik ke dalam medan keagamaan pasca-Reformasi, sebuah proses yang dalam kerangka analitis penelitian ini dapat dipahami sebagai penetrasi logika *champ économique* ke dalam *champ religieux* dalam terminologi Bourdieu (Fealy & White, 2008).

Membaca keseluruhan fenomena penyalahgunaan otoritas keagamaan yang telah diidentifikasi melalui lensa normatif QS. Al-Ma'un menghasilkan sebuah analisis yang sangat illuminatif tentang bagaimana kritik Qur'ani yang diturunkan empat belas abad lalu tetap memiliki presisi diagnostik yang luar biasa terhadap realitas kontemporer. Karakter-karakter yang dikritik dalam Al-Ma'un mereka yang menghardik anak yatim, tidak mendorong pemberian makan kepada orang miskin, lalai dari substansi shalatnya, dan berbuat riya secara struktural berkorespondensi dengan pola-pola penyalahgunaan otoritas keagamaan yang telah diidentifikasi: menelantarkan yang lemah berkorespondensi dengan instrumentalisasi politik yang mengorbankan kepentingan rakyat kecil; menahan kontribusi sosial berkorespondensi dengan komersialisasi otoritas yang mengakumulasi kekayaan melalui jaringan keagamaan; dan riya berkorespondensi dengan seluruh logika religiositas simbolik yang mengutamakan penampilan di atas substansi. Khaled Abou El Fadl dalam *Speaking in God's Name* menegaskan bahwa otoritas dalam penafsiran keagamaan yang otentik harus selalu disertai oleh apa yang ia sebut sebagai *moral agency* kesadaran penuh akan tanggung jawab moral yang melekat pada posisi tersebut dan komitmen untuk menggunakannya demi kepentingan keadilan, bukan demi kepentingan diri sendiri atau kelompok. Dalam perspektif ini, QS. Al-Ma'un berfungsi bukan hanya sebagai teks kritik historis, melainkan sebagai *mizan* timbangan normatif yang abadi untuk mengevaluasi legitimasi moral dari setiap klaim otoritas keagamaan dalam setiap konteks peradaban manusia el Fadl, A. (2001).

KESIMPULAN

Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa QS. Al-Ma'un bukan sekadar teks normatif yang berbicara dalam konteks historis Makkah abad ketujuh, melainkan sebuah kerangka kritik keberagamaan yang memiliki presisi diagnostik luar biasa terhadap fenomena distorsi religiusitas dalam setiap konteks peradaban. Melalui pendekatan tafsir bil ra'yi yang dioperasikan secara integratif bersama kerangka sosiologi agama kritis, penelitian ini menghasilkan tiga kesimpulan utama yang secara langsung menjawab tujuan penelitian yang dirumuskan dalam pendahuluan.

Pertama, analisis tafsir tematik terhadap QS. Al-Ma'un mengungkap bahwa surah ini membangun kritik yang beroperasi pada dua level sekaligus: level individual yang mengekspos inkonsistensi antara pengakuan iman dengan perilaku sosial, dan level struktural yang menggugat sistem sosial-keagamaan yang menggunakan agama sebagai instrumen legitimasi ketidakadilan. Temuan ini menegaskan bahwa evaluasi religiusitas dalam perspektif Al-Qur'an tidak dapat dibatasi pada dimensi ritualistik dan doktrinal, melainkan harus mencakup dimensi konsekuensial dampak nyata keberagamaan terhadap keberpihakan kepada kaum lemah dan marjinal.

Kedua, religiositas simbolik sebagai fenomena sosial terbukti bukan sekadar kegagalan moral individual, melainkan produk logis dari dinamika struktural dalam medan keagamaan yang memberikan insentif bagi penampilan kesalehan tanpa mensyaratkan internalisasi substansinya. Data empiris dari konteks Indonesia termasuk paradoks antara tingginya indeks religiusitas formal dengan rendahnya indeks integritas public mengkonfirmasi bahwa fenomena yang dikritik Al-Ma'un empat belas abad lalu masih hidup dan relevan dalam realitas kontemporer.

Ketiga, penyalahgunaan otoritas keagamaan dalam konteks Islam Indonesia kontemporer yang termanifestasi dalam instrumentalisasi politik, komersialisasi otoritas, dan monopoli kebenaran secara struktural berkorespondensi dengan karakter-karakter yang dikritik dalam Al-Ma'un. Korespondensi ini membuktikan bahwa QS. Al-Ma'un berfungsi sebagai *mizan* normatif yang abadi untuk mengevaluasi legitimasi moral setiap klaim otoritas keagamaan, dan bahwa tafsir bil ra'yi yang bertanggung jawab adalah instrumen hermeneutis yang produktif untuk mengaktualisasikan fungsi normatif tersebut dalam konteks kekinian.

Dari sisi kontribusi akademis, penelitian ini menawarkan model kajian tafsir interdisipliner yang mengintegrasikan hermeneutika Al-Qur'an dengan ilmu sosial kritis sebuah pendekatan yang membuka kemungkinan dialog produktif antara tradisi keilmuan Islam klasik dengan perangkat analitis ilmu pengetahuan modern tanpa mengorbankan integritas metodologis keduanya. Model ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan kajian tafsir kontekstual yang lebih sistematis dan lebih responsif terhadap tantangan keberagamaan kontemporer.

Sejumlah agenda penelitian lanjutan perlu dikembangkan untuk memperdalam temuan ini. Penelitian empiris berbasis etnografi atau survei yang secara langsung mengukur korelasi antara pola religiositas simbolik dengan kecenderungan penyalahgunaan otoritas keagamaan pada komunitas Muslim tertentu di Indonesia

akan memberikan konfirmasi empiris yang lebih kuat terhadap argumen normatif yang telah dibangun. Kajian komparatif lintas tradisi tafsir membandingkan bagaimana berbagai mazhab hermeneutika merespons problematika religiositas simbolik juga akan menghasilkan wawasan yang lebih kaya tentang kekayaan internal tradisi tafsir Islam dalam menghadapi persoalan-persoalan keberagamaan kontemporer. Selain itu, penelitian yang mengkaji efektivitas pendekatan tafsir bil ra'yi sebagai instrumen reformasi keagamaan dalam institusi pendidikan Islam Indonesia pesantren, madrasah, dan perguruan tinggi Islam akan berkontribusi secara praktis bagi upaya transformasi keberagamaan yang lebih substansial dan berkelanjutan di tingkat akar rumput.

REFERENSI

- Aji, T. S., & Yusron, A. (2022). Leadership Education Based on the Jamaah Concept in Sayyid Qutb's Tafsir Fî Zhilâl Al-Qur'ân. *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 6(1), 19–38. <https://doi.org/10.21009/hayula.006.01.02>
- Al-Dhahabi, M. H. (1976). *al-Tafsir wa al-Mufasssirun*. Dar al-Fikr.
- Amir, A. M., & Hamzah, G. (2019). Dinamika Dan Terapan Metodologi Tafsir Kontekstual. *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, 14(1), 1. <https://doi.org/10.31332/ai.v14i1.1177>
- Aswar, A., Shorfana, M. R., & Nadia, N. (2025). QS al-Ma'un sebagai Teks Emansipatoris: Kritik terhadap Simbolisme Keberagamaan Digital melalui Hermeneutika Pembebasan Hasan Hanafi: QS al-Ma'un as an Emancipatory Text: A Critique of Digital Religious Symbolism through Hasan Hanafi's Hermeneutics of Liberation. *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 5(2), 235–253. <https://doi.org/10.58404/uq.v5i2.658>
- Bowen, G. A. (2009). Document Analysis as a Qualitative Research Method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Bruinessen, M. van. (2013). *Contemporary Developments in Indonesian Islam: Explaining the "conservative Turn."* Institute of Southeast Asian Studies.
- Charles Y. Glock und Rodney Stark: *Religion and Society in Tension (1965)* | Springer Nature Link. (n.d.). Retrieved May 17, 2026, from https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-658-15250-5_26
- Charles Y. Glock und Rodney Stark: *Religion and Society in Tension (1965)*. In *Schlüsselwerke der Religionssoziologie* (pp. 221-229). Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden.
- Elkarimah, M. F. (2022). Munasabah In The Perspective Of Science Of The Quran: Study Of Al-Burhan Fi Ulumul Quran Works Of Al-Zarkasyi (D. 749 H). *Al-Risalah*, 14(1), 47–61. <https://doi.org/10.34005/alrisalah.v14i1.2209>
- Fealy, G., & White, S. (2008). *Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia*. Institute of Southeast Asian Studies.
- Hamid_Jordan_MB-libre.pdf. (n.d.). Retrieved May 15, 2026, from

- https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/49212819/Hamid_Jordan_MB-libre.pdf?1475158148=&response-content-d
- Islam & Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* —Fazlur Rahman—Google Books. (n.d.). Retrieved May 17, 2026
- Jannah, H. (2015). Kyai, Perubahan Sosial Da Dinamika Politik Kekuasaan. *FIKRAH*, 3(1), 157–176. <https://doi.org/10.21043/fikrah.v3i1.1831>
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. SAGE.
- Mannheim, K. (2013). *Ideology and utopia*. Routledge.
- M Yunus Firdaus, Yasin Taslim HM, & Rijal Syamsul. (2023). Politik Identitas dan Politisasi Agama Dalam Konteks Pemilu di Indonesia I. *Jurnal Sosiologi Dialektika Sosial*, 9(3). <https://ojs.unimal.ac.id/dialektika/article/view/12590>
- Miller, M., Clark, J., & Jehle, A. (2015). *Cognitive Dissonance Theory (Festinger)*. <https://doi.org/10.1002/9781405165518.wbeosc058.pub2>
- Muzayyin, M. (2015). A-Qur'an Menurut Pandangan Orientalis (Studi Analisis "Teori Pengaruh" Dalam Pemikiran Orientalis). *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis*, 16(2), 203–221. <https://doi.org/10.14421/qh.2015.1602-04>
- Nikmatika, T., & Izzat, F. H. E. (2026). Nilai-Nilai Sosial Dalam Al-Qur'an Tafsir Adabi Ijtima'i Terhadap Ayat-Ayat Kemanusiaan. *Al-Kalimantan: Jurnal Kajian Keislaman*, 3(3), 360–377.
- Nurhakim, H. Q., Rojibillah, I., Hasanah, A., & Arifin, B. S. (2025). Model Penanaman Nilai Karakter Pada Masyarakat Perspektif Ilmu Pendidikan Islam. *Kartika: Jurnal Studi Keislaman*, 5(2), 952–963. <https://doi.org/10.59240/kjsk.v5i2.218>
- Qonita Nabihha Naila, Sutanto Edy Taufik, & Inayah Nur. (2024). Analisis Dinamika Tren Otoritas Keagamaan: Studi Kasus di Twitter Indonesia Tahun 2009-2019. *Jurnal Ilmu Komputer Indonesia*, 13(2). <https://www.ijcs.net/ijcs/index.php/ijcs/article/view/3862>
- Rahman, F. (2009). *Major Themes of the Qur'an: Second Edition*. University of Chicago Press.
- Rumadi. (2012). Islam Dan Otoritas Keagamaan. *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 12(1). <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/walisongo/article/view/183>
- Samsi Tsauri, S., Muhammad, A. S., & Saputra, A. (2021). Corak Tafsir Balaghi (Studi Analisis Tafsir Al-Kassiyaf 'An Ghawamidh At-Tanzil Wa 'Uyun Al-Aqawil Fii Wujuh At-Ta'wil karya Abu al-Qasim Az-Zamakhsyari). *Zad Al-Mufasssirin*, 3(1), 1–20. <https://doi.org/10.55759/zam.v3i1.24>
- Solihin, A. (2024). Metode Tarjih Ibnu Jarir Ath-Thabari Dalam Tafsir Jami' Al-Bayan 'An Ta'wil Ayi Al-Qur'an. *Mumtaz: Jurnal Studi Al-Quran Dan Keislaman*, 8(2), 338–356.
- Sulaiman, A. (2023). From Textuality To Discursivity; The Hermeneutics of Quran Nasr Hamid Abu Zayd. *Sophist : Jurnal Sosial Politik Kajian Islam Dan Tafsir*, 5(2), 304–327. <https://doi.org/10.20414/sophist.v5i2.96>
- Sungadi, S. (2020). Pengaruh Religiusitas terhadap Kematangan Karier Pustakawan Kajian Empiris pada Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam di Daerah Istimewa

- Yogyakarta. *UNILIB : Jurnal Perpustakaan*, 11(1).
<https://doi.org/10.20885/unilib.vol11.iss1.art3>
- Susanti, E., & Rohwati, S. (2025). Negara, Ulama, dan Masyarakat: Relasi Kuasa dalam Produksi Otoritas Keagamaan di Indonesia Kontemporer. *Himmah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 9(2), 1098–1114. <https://doi.org/10.47313/jkik.v9i2.4355>
- Swedberg, R. (2007). Max Weber's Interpretive Economic Sociology. *American Behavioral Scientist*, 50(8), 1035–1055. <https://doi.org/10.1177/0002764207299352>
- Tafsir_Al-Mishbah_Jilid_10_*. (n.d.). Retrieved May 17, 2026, from https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/56290188/Tafsir_Al-Mishbah_Jilid_10_-Editan.pdf?1738373676=&response-content-
- Weber, M. (1978). *Economy and society* (vol. 1). Berkeley, CA: *University of California*, 90.